

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ASET TETAP  
PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Diploma III  
Akutansi Ahli Madya Di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**YUSUF SATRIA**  
**BP/NIM : 2013/1308210**

**PROGRAM STUDI AKUNTASI  
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2017**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**Analisis Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap Pada Dinas Pengelolaan  
Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.**

Nama : Yusuf Satria  
NIM/BP : 1308210/2013  
Program Studi : Akuntansi D III  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Desember 2017

Diketahui Oleh:  
Ketua Program Studi  
Diploma III Akuntansi



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak  
NIP. 19800809 201012 1 003

Disetujui Oleh:  
Pembimbing



Fefri Indra Arza, SE, M, SI, Ak  
NIP. 19730213 199903 1 003

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

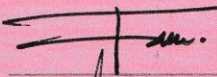

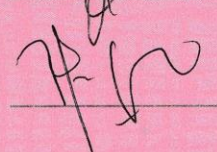
**Analisis Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap Pada Dinas Pengelolaan  
Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat**

Nama : Yusuf Satria  
NIM/BP : 1308210/2013  
Program Studi : Akuntansi D III  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Akuntansi Diploma III (DIII) Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang

Padang, Desember 2017

**Tim Penguji**

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Fefri Indra Arza, SE, M.Si, Ak	
2. Anggota : Salma Taqwa, SE, M.Si	
3. Anggota : Halkadri Fitra, SE, MM, Ak	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : yusuf satria  
Tahun Masuk/NIM : 2013/1308210  
Tempat/Tanggal Lahir : padang/26 april 1995  
Program Studi : Diploma III Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : pondok pratama I C/16 lubuk buaya,padang  
Judul Tugas Akhir : **Analisis Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Juli 2018

Yang menyatakan



Yusuf Satria

NIM :1308210/2013

## **ABSTRAK**

### **Yusuf Satria : Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat**

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat bergerak di bidang Keuangan Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja aset tetap yang ada di instansi dan pengelolaan dan pengawasan terhadap aset tetap di Dinas Prasarana Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan SAP No 09 dan PP 24 tahun 2005

Bentuk penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian studi lapangan karena penelitian ini hanya mengumpulkan data, melakukan wawancara, mencari fakta, kemudian menjelaskan dan menganalisis data yaitu dengan cara pengumpulan dan penyusunan data, selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan landasan teori yang ada.

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang apa saja aset tetap yang terdapat di instansi serta pengelolaan dan pengawasan aset tetap di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang Dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan SAP No 09 dan PP 24 tahun 2005. Berdasarkan 1) Pengertian Aset tetap. 2) Klasifikasi aset tetap. 3) perolehan aset tetap. 4) pengakuan aset tetap. 5) penilaian aset tetap. 6) pengeluaran setelah masa perolehan. 7) penyusutan aset tetap. 8) pemberhentian aset tetap. 9) penyajian dan pengungkapan aset tetap.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuni-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **“Sistem Pengendalian Intern Aset tetap Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat”**. Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk kedua orang tua, Ibunda Merita dan Ayahanda Akmal, serta kepada teman dekat saya Resti Eliza yang selalu memberikan doa dan dukungan baik berupa moral maupun materil.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Halkadri Fitra, SE. M.M, Ak selaku Ketua Prodi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Fefri Indra Arza, SE. M.S.I. Ak selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasihat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

5. Selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki dan kesempurnaan tugas ak
6. Bapak dan Ibu dosen, Staf pengajar dan Karyawan program studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Pustakawan/wati Universitas Negeri Padang.
8. Karyawan dan karyawan/wati Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Rekan – rekan mahasiswa program studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya Akuntansi Diploma III Ganjil dan Genap 2013
10. Para grup cewek yang sudah mendoakan dan memberikan dukungan
11. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu – persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak memiliki kekurangan, hal itu disebabkan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki serta kurangnya kelengkapan buku – buku penunjang. Karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan isi Tugas Akhir ini, agar dapat berguna bagi pembaca untuk pengetahuan kita bersama, serta dapat bermanfaat khususnya bagi penulis.

Padang, Januari 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. ....	
Latar Belakang .....	1
B.....	
Rumusan Masalah.....	6
C.....	
Tujuan Penelitian .....	6
D. ....	
Manfaat Penelitian .....	6
E.....	
Sistematik Penulisan .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. ....	
Landasan Teori.....	9
1. ....	
Sistem Pengendalian Intern.....	9
2. ....	
Aset Tetap .....	27

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. ....	
Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	24
B.....	
Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
C.....	
Jenis dan Sumber Data.....	36
D. ....	
Metode Pengumpulan Data.....	37
E.....	
Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. ....	
Metode Analisis .....	40
G. ....	
Keabsahan Data .....	44

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. ....	
Sejarah Instansi .....	47
B.....	
Dasar Hukum Instansi.....	48
C.....	
Visi dan Misi.....	48
D. ....	
Tugas Pokok dan Fungsi.....	49
E.....	

Sturktur Organisasi .....	50
F. ....	
Pembahasan.....	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. ....	
Kesimpulan .....	71
B.....	
Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tata laksana dalam suatu tata kerja yang kongkrit dibuktikan dengan adanya peningkatan administrasi dan manajemen yang baik dan lengkap. Agar terciptanya administrasi dan manajemen tata kerja yang baik dan lengkap diperlukan suatu sistem yang mengaturnya yang disebut sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem untuk mengendalikan data kongkrit yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasiikan dalam menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Sesuai dengan ungkapan Mulyadi (2016:129) bahwa “sistem pengendalian internal adalah sistem pengendalian meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut.

Sistem Pengendalian Intern menurut PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

Membawakan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang fektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Kemudian Mulyadi (2016:129) mengungkapkan bahwa tujuan sistem pengendalian internal adalah (1) menjaga aset organisasi, (2) mengecek ketelitian dan keadaan data akuntansi, (3) mendorong efisiensi, dan (4) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Aset merupakan harta kekayaan yang perlu dijaga dan dirawat, begitu juga terhadap aset pemerintah. Aset yang berada pada suatu dinas merupakan harta kekayaan pemerintah yang perlu ditata sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu manajemen yang kongkrit dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah menjelaskan “aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”.

Sedangkan aset tetap merupakan aset berwujud yang digunakan dalam berjangka waktu yang dapat digunakan dalam kegiatan oleh pemerintah atau masyarakat umum. Sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah bahwa “Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam berjangka waktu yang dapat digunakan dalam kegiatan oleh pemerintah atau masyarakat umum”.

Pengamanan aset pemerintah menjadi perhatian penting, karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat pada mudahnya terjadi pencurian, penggelapan dan bentuk manipulasi lainnya. Kejadian terhadap aset tersebut dapat merugikan instansi pemerintah yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa. Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga disebutkan bahwa Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset bisa didapat melalui pembelian, transfer masuk, barang hasil sitaan, dan hibah.

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di bawah jajaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, setelah sekian tahun lamanya bergerak dibidang roda keuangan pemerintahan. Hal ini ditandai dengan semakin banyak munculnya perubahan-perubahan perundang-undangan pemerintah yang mengatur tentang tata kerja pada instansi tersebut, dan semakin banyaknya dijelaskan poin-poin pekerjaan yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Banyaknya kebijakan penyelenggaraan administrasi keuangan daerah dalam pemerintahan, pengawasan dan pembinaan yang berhubungan dengan tata kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Terkait dengan uraian di atas, penerapan sistem pengendalian intern pada akhirnya menjadi salah satu agenda penting bagi setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan manajemen yang handal dan akurat. Termasuk di dalamnya yang mengemban amanat ini adalah dinas daerah selaku instansi pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sudah seharusnya dimiliki dan diterapkan oleh dinas daerah terutama dalam Tugas Akhir ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dengan diterapkannya pengendalian intern aset yang memadai, maka penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, mulai dari transaksi aset, penggolongan aset, sampai dengan pertanggungjawaban laporan dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien. Hal

ini tentunya tidak hanya memberikan dampak positif pada peningkatan kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, namun sekaligus dapat memberikan

keyakinan yang memadai bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan opini terhadap pengelolaan keuangan Negara termasuk aset dalam instansi tersebut.

Pada dinas pengelolaan keuangan daerah provinsi sumatra barat penulis menemukan adanya sejumlah aset tetap yang rusak berat, namun masih disajikan kepada akun aset tetap yang masih beroperasi. Aset tetap yang rusak berat telah diusulkan untuk dihapuskan tetapi belum mendapat persetujuan, hal ini tidak benar karena aset tetap yang tidak memberikan manfaat ekonomis harus dikeluarkan dari pembukuan agar nilai yang tercatat dalam laporan keuangan menghasilkan informasi yang benar dan dapat diyakini nilai kewajarannya. Karena sebagaimana diketahui, tujuan dari operasional sebuah instansi adalah untuk mencapai tujuan dalam memperoleh administrasi seoptimal mungkin.

Maka berdasarkan uraian di atas diharapkan tugas akhir ini dapat menjadi sumber informasi dan gambaran akan pentingnya pelaksanaan sistem pengendalian intern aset tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan kebijakannya dalam mengelola aset pemerintah, yang akan dituangkan dalam proposal tugas akhir dengan judul :“**Analisis Sistem**

## **Pengendalian Intern Aset Tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalahnya secara umum adalah “Bagaimana analisis sistem pengendalian intern aset tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.”

### **B. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan hal-hal yang dirumuskan dan dikembangkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah “ Mendeskripsikan analisis sistem pengendalian intern aset tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.”

### **C. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis, tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan manajemen terhadap analisis sistem pengendalian intern aset tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Secara praktis, hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak, antara lain:

1. Sebagai masukan bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan pihak terkait dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen analisis sistem pengendalian intern aset tetap.

2. Sebagai alat untuk memperkaya pengetahuan dalam meningkatkan manajemen analisis sistem pengendalian intern aset tetap terhadap mutu dan perkembangan di masa yang akan datang khususnya di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan penulis khususnya yang terkait dengan analisis sistem pengendalian intern aset tetap.
4. Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat disumbangkan saran-saran atau masukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi unsur terkait, terutama tentang masalah yang akan muncul dalam proses analisis sistem pengendalian intern aset tetap di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan penulisan ini dibagi menjadi tiga bab dengan tujuan agar memudahkan pemahaman bagi pembaca.

- a. Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari atas lima sub bab yang membahas tentang dasar pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, sistematika penulisan.
- b. Bab kedua akan membahas tentang landasan teori dari analisis sistem pengendalian intern aset tetap. Bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Sub bab, pertama membahas tentang analisis sistem pengendalian intern yang

terdiri dari pengertian dan karakteristik. Sub bab kedua mengenai aset tetap. Sub bab ketiga membahas analisis sistem pengendalian intern aset tetap.

- c. Bab ketiga metodologi penelitian, merupakan gambaran umum Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama mengenai sejarah, struktur organisasi dan deskripsi jabatan. Metode penelitian terdiri dari metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan metode analisa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Sistem pengendalian intern pada dinas pengelolaan keuangan daerah provinsi Sumatera Barat untuk fungsi penerimaan aset tetap masih dilakukan satu orang tanpa adanya otorisasi dari kepala bagian hanya saja bagian penerimaan aset tetap langsung melapor ke bagian akuntansi dan ini ditakutkan akan menjadi kecurangan oleh pihak fungsi penerimaan aset tetap. Perlu dilakukannya pemisahan fungsi agar semua hal yang berkaitan dengan aset tetap tidak hanya melibatkan satu orang saja, tapi juga melibatkan orang lain agar tidak terjadi terjadinya kecurangan dalam pengurusan untuk aset tetap ini. Kemudian fungsi penerimaan harus melapor dan meminta otorisasi kepada kepala bagian sebelum dilaporkan kepada fungsi akuntansi menghindari terjadinya kecurangan oleh salah satu pihak dan berjalannya fungsi dan tugas secara baik terhadap masing-masing fungsi.

2. Berdasarkan prosedur pencatatan yang dilakukan pada dinas pengelolaan dinas pengelolaan keuangan daerah prov. Sumatera Barat, telah berjalan dengan baik. Fungsi pencatatan telah melakukan pengambilan barang dan memasukan data barang kedalam buku inventaris, namun masih terdapat

ketidaksesuaian pencatatan kondisi aset tetap yang ada dibuku inventaris dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan ada aset tetap yang rusak berat dari setiap bidang tetapi tidak dilaporkan ke fungsi pengurus barang aset tetap. Dan fungsi pengurus barang harus mengecek secara langsung aset tetap yang digunakan, dioperasikan ke setiap bidang secara berkala agar bisa mengetahui kondisi aset yang sebenarnya dan meminta otorisasi kepala bidang untuk melaporkan hasil pencatatan aset tetap dinas pengelolaan keuangan daerah prov. sumatera barat ke biro aset sesuai peraturan yang berlaku.

3. Berdasarkan yang telah di terapkan di dinas pengelolaan keuangan daerah prov. sumatera barat proses penghapusan aset daerah mengalami kendala yang mana aset tetap yang rusak berat masih disajikan dalam akun aset tetap yang masih beroperasi. aset tetap yang rusak berat telah diusulkan untuk dihapuskan tetapi belum mendapat persetujuan hal ini memerlukan praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari setiap unit di dinas pengelolaan keuangan daerah prov. sumatera barat dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pegawai yang tidak melaksanakan tugas dengan disiplin dan jujur sehingga proses pengecekan fisik, pelelangan, serta penghapusan aset tetap oleh biro aset bisa berjalan lancar dan mempersingkat waktu pengesahan pelelangan dan penghapusan aset. Setelah itu maka fungsi akuntansi dapat mencatat aset tetap sesuai dengan nilai sebenarnya.

4. Berdasarkan kejadian di dinas pengelolaan keuangan daerah prov. Sumatera Barat banyak pegawai yang masih belum sesuai dengan ekspektasi di kehidupan modern seperti melakukan pekerjaan secara manual ini berdampak terhadap waktu pekerjaan yang terlalu lama dan menjadi tidak efektif serta efisien, maka dari itu diperlukan pegawai yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya sebaiknya dinas pengelolaan keuangan daerah prov. Sumatera Barat melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap pegawai yang kurang menguasai komputer serta alat bantu untuk mempermudah pekerjaan dan mempersingkat waktu sehingga terdapat peningkatan kinerja pegawai dinas pengelolaan keuangan daerah dalam melaksanakan tugas dan memberi pengembangan pendidikan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi dinas pengelolaan keuangan daerah provinsi Sumatera Barat, antara lain:

1. sebaiknya Perlu dilakukan nya pemisahan fungsi agar semua hal yang berkaitan dengan aset tetap tidak hanya melibatkan satu orang saja, tapi juga melibatkan orang lain agar tidak terjadi terjadinya kecurangan dalam pengurusan untuk aset tetap ini. Kemudian fungsi penerimaan harus melapor

dan meminta otorisasi kepada kepala bagian sebelum dilaporkan kepada fungsi akuntansi menghindari terjadinya kecurangan oleh salah satu pihak dan berjalannya fungsi dan tugas secara baik terhadap masing-masing fungsi.

2.fungsi pengurus barang harus mengecek secara langsung aset tetap yang digunakan,dioperasikan ke setiap bidang secara berkala agar bisa mengetahui kondisi aset yang sebenarnya dan meminta otorisasi kepala bidang untuk melaporkan hasil pencatatan aset tetap dinas pengelolaan keuangan daerah prov. sumatera barat ke biro aset sesuai peraturan yang berlaku.

2. memerlukan praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari setiap unit di dinas pengelolaan keuangan daerah prov.sumatera barat dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pegawai yang tidak melaksanakan tugas dengan disiplin dan jujur sehingga proses pengecekan fisik,pelelangan,serta penghapusan aset tetap oleh biro aset bisa berjalan lancar dan mempersingkat waktu pengesahan pelelangan dan penghapusan aset. Setelah itu maka fungsi akuntansi dapat mencatat aset tetap sesuai dengan nilai sebenarnya.

3. diperlukannya pegawai yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya sebaiknya dinas pengelolaan keuangan daerah prov.sumatera barat melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap pegawai yang kurang menguasai komputer serta alat bantu untuak mempermudah pekerjaan dan mempersingkat waktu sehingga terdapat peningkatan kinerja pegawai dinas

pengelolaan keuangan daerah dalam melaksanakan tugas dan memberi pengembangan pendidikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Biro Hukum & Humas BPKP. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Pustaka Pergaulan : Jakarta
- Biro Hukum & Humas BPKP. 2009. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Pustaka Pergaulan : Jakarta
- Nasution S, 2001. *Berbagai Metodologi Penelitian*. Jakarta. Bina Aksara.
- Nugroho, 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Erlangga:Jakarta
- Lexy Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi, 2016. *Sistem Akuntansi. Selemba Empat*. Jagakarsa:Jakarta Selatan
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996)
- PP nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintah*. Pustaka Pergaulan : Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 660 Tahun 2008 *Tentang unsur-unsur system pemerintah*.